

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WBK/WBBM

IV.BIDANG Penguatan Akuntabilitas

TARGET	INDIKATOR	KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	DATA DUKUNG	INDEX	
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah	1. Keterlibatan pimpinan	1) pimpinan harus terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan a. Melaksanakan rapat perencanaan kegiatan dan anggaran yang dipimpin oleh kepala Satuan Kerja		1								1			✓ undangan, notula, daftar hadir, foto rapat ✓ dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran	IV.1.1 IV.1.1.a	
		2) penyusunan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) melalui Rapat penetapan IKU yang berorientasi hasil		1											✓ undangan, notula, daftar hadir, foto rapat ✓ dokumen Perjanjian Kinerja.	IV.1.2	
		3) Melaksanakan rapat pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan terhadap dipimpin oleh kepala satuan kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	✓ undangan, notula, daftar hadir, foto rapat ✓ dokumen pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan dipimpin oleh kepala satuan kerja.	IV.1.3
		1) membuat dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan a. Memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) serta Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja)		1												dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) serta Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja)	IV.2.1
	2) dokumen perencanaan harus berorientasi kepada hasil a. membuat turunan Renja yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat)		1												Pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat) serta mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SDIP	IV.2.2	

<p>b. membuat turunan Renja yang mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan WBS)</p>																				<p>(pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan WBS)</p>	
<p>3) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada satuan kerja a. Memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan organisasi b. Membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat) serta mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan WBS)</p>	1																			<p>Dokumen IKU dan IKU tambahan yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat) serta mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan WBS)</p>	IV.2.3
<p>4) indikator kinerja utama telah dilaksanakan dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achivable, Relevant, Timely/Continuity). a. Memiliki IKU tambahan yang SMART (Specific, Measurable, Achivable, Relevant, Timely/Continuity)</p>	1																			<p>Dokumen IKU tambahan yang SMART (Specific, Measurable, Achivable, Relevant, Timely/Continuity)</p>	IV.2.4
<p>5) laporan kinerja disusun tepat waktu a. menyusun LKIP secara tepat waktu (bulan januari pada tahun berikutnya)</p>					1															<p>Dokumen LKIP</p>	IV.2.5

<p>6) pelaporan kinerja harus memberikan informasi tentang kinerja</p> <p>a. Laporan kinerja (LKIP) telah memberikan informasi tentang kinerja</p>					1								Dokumen LKIP	IV.2.6
<p>7) terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja</p> <p>a. Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan melakukan/mengikutsertakan dalam bimtek/diklat/sosialisasi penyusunan LKIP</p>		1											dokumen laporan bimtek/diklat/sosialisasi penyusunan LKIP	IV.2.7
<p>8) pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten</p> <p>a. menempatkan anggota yang memiliki kompetensi pada bidang pengelolaan akuntabilitas;</p> <p>b. personil pengelolaan akuntabilitas telah memiliki Sertifikasi, Piagam penyusunan LKIP.</p>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Daftar anggota bidang perencanaan yang telah mengikuti diklat	IV.2.8